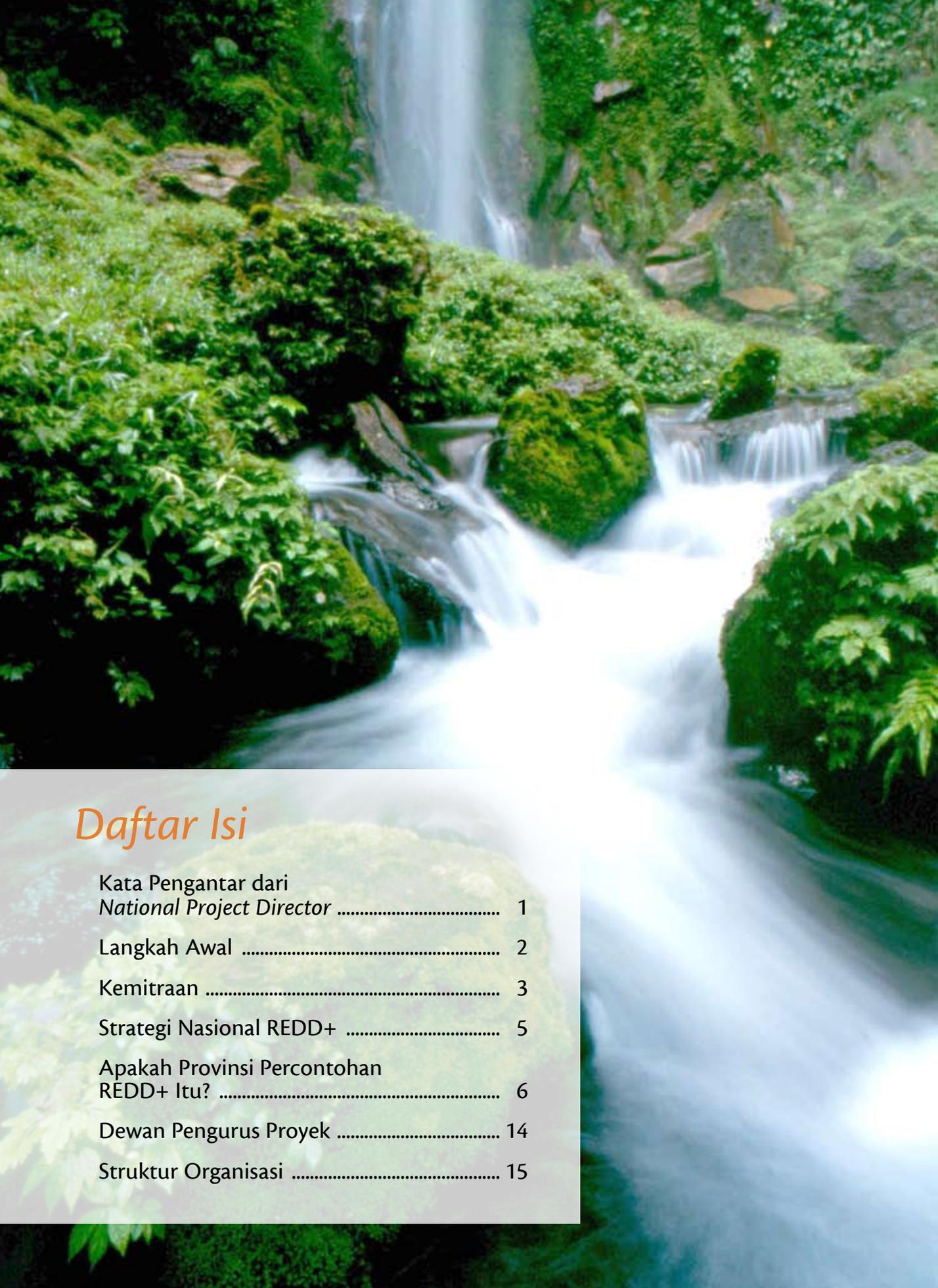


Tahun Pertama UN-REDD Programme Indonesia:
Mempercepat Kesiapan REDD+ Nasional



Tahun Pertama UN-REDD Programme Indonesia:
Mempercepat Kesiapan REDD+ Nasional



Daftar Isi

Kata Pengantar dari <i>National Project Director</i>	1
Langkah Awal	2
Kemitraan	3
Strategi Nasional REDD+	5
Apakah Provinsi Percontohan REDD+ Itu?	6
Dewan Pengurus Proyek	14
Struktur Organisasi	15

Kata Pengantar dari National Project Director



UN-REDD Programme Indonesia telah diluncurkan secara resmi pada akhir bulan Maret 2010. Momen itu menandai titik dimulainya UN-REDD Programme Indonesia dalam mengimplementasikan aktivitas-aktivitasnya secara penuh. Sejak acara peluncuran itu, UN-REDD Programme Indonesia telah melaksanakan banyak aktivitas. Bersama ini, dengan senang hati saya menyampaikan ringkasan aktivitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2010 dan awal tahun 2011, juga memberikan informasi ringkas berkaitan dengan UN-REDD Programme Indonesia.

Melalui berbagai aktivitas yang diselenggarakan secara intensif selama tahun 2010, UN-REDD Programme Indonesia telah berupaya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya-upaya REDD+ di Indonesia. UN-REDD Programme Indonesia telah membantu pencapaian beberapa tujuan nasional dan mendukung berbagai proses nasional seperti penyusunan draf Strategi Nasional REDD+ (Stranas REDD+). UN-REDD Programme Indonesia juga membantu penyusunan konsep Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC), dengan mendukung inisiatif konsensus nasional di antara masyarakat adat dan komunitas lokal, untuk membahas pentingnya implementasi FPIC demi kesuksesan REDD+ dalam waktu dekat.

Saya percaya pencapaian target-target UN-REDD Programme Indonesia tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah diberikan dengan tulus. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada para partner kami, khususnya kepada semua unit di Kementerian Kehutanan, Pemerintah Norwegia, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Satuan Tugas Nasional REDD+ (Satgas Nasional REDD+), Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP), juga pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Kami tetap menantikan dukungan dan kerja sama dari para partner kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan UN-REDD di masa mendatang agar tercapai hasil yang berkualitas tinggi dan dapat membawa Indonesia menuju kesiapan REDD+.

Ir. Yuyu Rahayu, MSc.
National Project Director



Langkah Awal

Tak seorang pun yang menghadiri konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Bali (Desember 2007), di Copenhagen (Desember 2009), dan Cancún (November - Desember 2010) yang meragukan betapa pentingnya hutan dalam perubahan iklim global. Ada kesepakatan tak tertulis yang menyatakan bahwa jika kita ingin berhasil mengatasi pemanasan global, kita harus mengubah cara kita mengelola dan memanfaatkan hutan. Terkait dengan pernyataan ini, konferensi-konferensi di atas merupakan ajang negosiasi dari berbagai negara untuk memperoleh kesepakatan tentang mekanisme untuk menurunkan tingkat emisi yang diakibatkan deforestasi dan degradasi hutan atau sekarang ini dikenal dengan REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*). Usulan Pemerintah Inggris yang menyatakan bahwa ‘menghindari deforestasi’ haruslah menjadi unsur penting dalam negosiasi tentang perubahan iklim merupakan salah satu pendukung di awal munculnya REDD+ ini. Hasil dari konferensi perubahan iklim di Bali tahun 2007 (COP13) menyarankan agar negara-negara berkembang menyiapkan diri untuk implementasi REDD+ pada akhir tahun 2012.

Pemerintah Republik Indonesia (RI), bekerja sama dengan badan-badan yang ada di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP), mengembangkan suatu program kerja sama untuk menindaklanjuti rekomendasi COP13 yang disebut dengan UN-REDD National Joint Programme. Program ini bertujuan mendukung Indonesia mencapai kesiapan REDD+ sebelum akhir tahun 2012. Program kerja sama UN-REDD tersebut ditandatangani oleh Kementerian Kehutanan RI dan ketiga badan PBB yang telah disebutkan di atas pada tanggal 23 November 2009 di Jakarta. Acara peluncuran pelaksanaan program ini dilaksanakan pada akhir bulan Maret 2010, yang menandai langkah awal pelaksanaan program UN-REDD di Indonesia secara penuh. Ada tiga hasil yang hendak dicapai UN-REDD Programme Indonesia:

1. Kuatnya partisipasi dan konsensus berbagai pihak di level nasional dan provinsi;
2. Berhasilnya percontohan penyusunan REL, MRV dan sistem pembayaran yang adil berdasarkan arsitektur REDD nasional;
3. Terbangunnya kapasitas untuk melaksanakan REDD+ di tingkat kabupaten.

Untuk mewujudkan ketiga hasil tersebut, UN-REDD Programme Indonesia telah bekerja sama dengan mitra-mitra dari beberapa lembaga seperti Satgas Nasional REDD+, Bappenas, DNPI, dan DKN.

Kemitraan



Cukup banyak kemajuan yang terkait dengan peran REDD+ dalam mengejar target akhir UNFCCC untuk mengatasi kenaikan suhu global di atas suhu periode pra industri. Kemajuan tersebut dapat dilihat dari hasil Kesepakatan Copenhagen dan Keputusan 4/CP.15 tentang metodologi REDD+, hasil Kelompok Kerja Ad Hoc tentang Aksi Kerja Sama Jangka Panjang REDD+ (*the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action* atau AWG-LCA), juga Keputusan 1/CP.13. Lebih jauh lagi yakni pada pertemuan tingkat kementerian di Paris bulan Maret 2010, diperoleh momentum politik ketika sekitar lima puluh negara meminta agar Kemitraan REDD+ diresmikan pada Konferensi Perubahan Iklim dan Hutan di Oslo 2010 (*Oslo Climate Change and Forest Conference 2010*).

Indonesia dan Norwegia sama-sama menyadari bahwa perubahan iklim merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia pada saat ini. Terkait dengan ini, Indonesia telah menyatakan komitmen dengan menetapkan target penurunan emisi yang ambisius dan Norwegia ingin membantu upaya Pemerintah Indonesia mewujudkan komitmen tersebut. Untuk itu, Norwegia dan Indonesia telah menyepakati untuk bermitra dalam mendukung upaya Indonesia menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca akibat deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut. Wujud dukungan Norwegia ini adalah dengan menyediakan pendanaan sampai dengan USD1 miliar yang akan dibayarkan berdasarkan capaian kinerja Indonesia selama periode 7-8 tahun mendatang.

Kesepakatan USD1 miliar itu sangat mempengaruhi perdebatan tentang kesiapan REDD+ Indonesia, dan memberikan laju kecepatan serta



Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, memukul gong tradisional sebagai simbol yang menandai dimulainya kegiatan UN-REDD secara resmi di Indonesia, pada acara Lokakarya Peresmian (Inception Workshop, Maret 2010). Acara tersebut dihadiri oleh UN Resident Coordinator, El-Mostafa Benlamlih.
(Foto: UN-REDD Programme Indonesia)

intensitas proses persiapan REDD+ yang baru. Hasilnya, Pemerintah RI merasakan perlunya membangun kapasitas para pemangku kepentingan di pemerintahan pusat terkait dengan isu perubahan iklim dan REDD+. Dalam konteks ini, UN-REDD Programme Indonesia yang telah diluncurkan sebelumnya, mengambil inisiatif mendukung kegiatan pelatihan-pelatihan tentang perubahan iklim dan REDD+ bagi lembaga-lembaga penting di tingkat nasional seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim. UN-REDD Programme Indonesia juga memberikan dukungan praktis kepada lembaga-lembaga yang ada di berbagai pemerintahan, dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang terkait REDD+, termasuk Satgas Nasional REDD+ yang dipimpin oleh Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Dukungan terhadap lembaga-lembaga terkait seperti UKP4 dalam persiapan mereka menuju arsitektur REDD+ nasional merupakan sinergi yang tepat dengan program UN-REDD. Hal itu membawa UN-REDD Programme Indonesia menuju capaian kunci di bawah Hasil no. 1 program nasional UN-REDD, yaitu **'kuatnya partisipasi dan konsensus multipihak di level nasional dan provinsi'**.

"UN-REDD Programme Indonesia telah banyak membantu kami, sejak awal kami telah bekerja sama dengan UN-REDD.

Mereka memberikan akses terhadap para ahli dan sumber dana bagi proses ini. Peran mereka cukup signifikan karena mereka tidak hanya memberikan dukungan finansial, tapi juga akses untuk berdiskusi dengan para ahli dan masyarakat sipil."

Basah Hernowo -
Direktur Kehutanan dan
Konservasi Sumber Daya
Air, Bappenas

Mitra lainnya

Ada beberapa mitra lain yang membantu upaya REDD+ di Indonesia. Pada bulan Mei 2010, Norwegia dan Indonesia menandatangani *Letter of Intent (LoI)* senilai USD1 miliar. Ini merupakan upaya terkait dengan isu REDD+ yang paling signifikan yang pernah diwujudkan oleh mitra Indonesia hingga saat ini. Selain itu, ada mitra lainnya seperti Australia (AusAID dan *the Indonesia-Australia Forest Carbon Partnership*), Jerman (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* dan KfW Bank), serta Amerika Serikat (Kedutaan Besar AS dan USAID). Mereka ini termasuk mitra-mitra yang menyumbangkan dana cukup besar bagi inisiatif REDD+ di Indonesia.

Strategi Nasional REDD+



Untuk mensukseskan strategi REDD+, partisipasi pemangku kepentingan secara luas menjadi hal yang mendasar, dan sebisa mungkin dilakukan di awal penyusunan dan di proses perencanaan. UN-REDD Programme Indonesia menyadari hal itu. Salah satu peran penting UN-REDD Programme Indonesia terkait dengan strategi REDD+ adalah mendukung Bappenas dan proyek *Legal Empowerment and Assistance to the Disadvantaged (LEAD)* UNDP. Salah satu hasil utama yang dicapai di tahun 2010 adalah tersusunnya draf Stranas REDD+. UN-REDD Programme Indonesia memfasilitasi proses konsultasi yang intensif, menyeluruh, dan melibatkan pemangku kepentingan multipihak dalam proses penyusunan draf Stranas REDD+. Metodologi yang digunakan pada proses konsultasi ini diilhami oleh proyek LEAD UNDP, dan rancangan yang ditargetkannya merupakan kolaborasi berbagai unit di UNDP. Dimulai pada Juli 2010 dan berlangsung selama beberapa bulan, proses penyusunan itu telah melibatkan banyak diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions* atau FGD) dan konsultasi-konsultasi di tingkat nasional, juga persiapan dan pelaksanaan serangkaian Rapat Konsultasi Regional. Lebih dari 300 ahli yang mewakili lebih dari 200 organisasi lokal, nasional, maupun internasional berpartisipasi di tujuh Konsultasi Publik Regional dan satu Konsultasi Publik Nasional. Selama proses tersebut, UN-REDD Programme Indonesia mengembangkan pendekatan kemitraan dengan Bappenas maupun kementerian-kementerian terkait, pemerintah sub-nasional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat sipil, kalangan akademisi, dan pelaku swasta. Dengan membuka akses atas proses tersebut, UN-REDD Programme Indonesia telah meningkatkan partisipasi dan rasa kepemilikan para pemangku kepentingan, serta memperbaiki kualitas draf Stranas itu sendiri.

Dengan dukungan dan fasilitasi dari UN-REDD Programme Indonesia, proses penyusunan Stranas menghasilkan tiga Draft Publik, satu Ringkasan Eksekutif Strategi Nasional REDD+, dan satu Laporan Hikmah Pembelajaran yang dipetik dari proses konsultasi pemangku kepentingan multipihak.

Pada tanggal 18 November 2010, Bappenas secara resmi menyerahkan Draft Final Strategi Nasional REDD+ kepada Satgas REDD+. Di tahun 2011, UN-REDD Programme Indonesia terus terlibat dalam proses multipihak untuk menyelesaikan Strategi REDD+.



Apakah Provinsi Percontohan REDD+ Itu?

REDD+ adalah salah satu tindak lanjut mandat keputusan COP13. Menurut Keputusan 2 COP13, negara-negara maju dan berkembang dianjurkan bekerja sama dalam upaya-upaya menurunkan tingkat emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, termasuk dukungan finansial, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Sebagai tambahan, Aktivitas Percontohan (*Demonstration Activity* atau DA) REDD+ dapat menjadi fasilitas pembelajaran dan sarana untuk membangun komitmen dan sinergi di antara para pemangku kepentingan multipihak. Dengan demikian, pengembangan DA REDD+ merupakan komponen penting dalam Strategi Kesiapan REDD+ di Indonesia. Karenanya, berbagai kegiatan terkait metodologi, kebijakan, dan keterlibatan para pemangku kepentingan diterapkan.

Untuk Hasil 1 yang ditetapkannya, UN-REDD Programme Indonesia telah mendukung aktivitas-aktivitas terkait REDD+ dalam meningkatkan konsensus dan partisipasi multipihak di tingkat nasional. Karena UN-REDD Programme Indonesia juga harus mengembangkan kriteria untuk proyek percontohnya, program tersebut memfasilitasi rapat-rapat konsultasi untuk menentukan Kriteria Seleksi Provinsi Percontohan REDD+ seperti yang disyaratkan dalam Lol. Pada saat ini, Satgas Nasional REDD+ bertanggung jawab menyelesaikan susunan kriteria tersebut.

Provinsi percontohan dibutuhkan sebagai lokasi percontohan untuk mencapai kesiapan implementasi REDD+ nasional. Setelah Lokakarya Peluncuran UN-REDD Programme Indonesia, Pemilihan Provinsi Percontohan untuk UN-REDD Programme Indonesia telah selesai dilakukan. Berdasarkan Kriteria



Rapat Dewan Eksekutif Program (*Programme Executive Board Meeting*) yang pertama, diselenggarakan di Kementerian Kehutanan (Februari 2011). Rapat tersebut dihadiri oleh PMU, UN Resident Coordinator, perwakilan-perwakilan FAO dan UNDP di Jakarta, perwakilan Kedubes Norwegia di Jakarta, juga mitra-mitra UN-REDD Programme Indonesia. (Foto: UN-REDD Programme Indonesia)

Seleksi DA yang dikembangkan oleh UN-REDD Programme Indonesia dan masukan dari pemangku kepentingan multipihak, akhirnya Sulawesi Tengah terpilih menjadi Provinsi Percontohan Utama Program UN-REDD di Indonesia. Terpilihnya Sulawesi Tengah sebagai Provinsi Percontohan didasarkan pada fakta-fakta bahwa masih ada deforestasi namun tutupan lahan masih baik; kepadatan karbon yang relatif tinggi; dukungan politik daerah yang kuat; kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat; penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah; REDD+ di wilayah itu dapat menghasilkan berbagai manfaat yang signifikan; preferensi pemerintah; serta belum adanya inisiatif REDD+ lainnya di wilayah itu. Sulawesi Tengah diresmikan secara formal sebagai DA UN-REDD Programme Indonesia melalui acara peluncuran UN-REDD Programme Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 13 dan 14 Oktober 2010. Lebih dari 200 orang hadir di acara itu, termasuk Gubernur Sulawesi Tengah, perwakilan-perwakilan dari FAO, UNDP, UNODC, LSM, organisasi masyarakat sipil, universitas partner, dan sektor swasta.

Tak lama setelah peluncurannya secara resmi, beberapa hasil telah dicapai oleh UN-REDD Programme Indonesia dan mitra-mitranya di Sulawesi Tengah. Setelah beberapa konsultasi multipihak yang bertujuan membangun pemahaman yang sama dan mempromosikan koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan di Provinsi itu, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ tingkat provinsi telah dibentuk secara resmi, ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tengah no. 522/84/Dishutda – G.ST/2011, tanggal 18 Februari 2011. SK itu diumumkan secara resmi kepada publik pada tanggal 14 Maret 2011 pada acara Pengukuhan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah tahun 2011, sekaligus diumumkan nama-nama anggota Kelompok Kerja tersebut.



Perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal sedang berdiskusi untuk menentukan kriteria dalam memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di Pokja REDD+ Sulawesi Tengah (Januari 2011)
(Foto: UN-REDD Programme Indonesia)



Peserta lokakarya dari kamar masyarakat adat dan komunitas lokal sedang membahas hikmah pembelajaran untuk panduan FPIC. Lokakarya diselenggarakan oleh DKN dan difasilitasi oleh UN-REDD Programme Indonesia (Januari 2011).
(Foto: UN-REDD Programme Indonesia)

Pokja REDD+ mewakili semua pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, yaitu Pemerintah Provinsi, kalangan universitas, komunitas lokal/masyarakat adat, LSM yang mempromosikan kesetaraan gender, dan LSM lainnya. Untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas-tugas mereka, Pokja tersebut memiliki sekretariat di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Palu.

Selain penetapan Sulawesi Tengah sebagai Provinsi Percontohan, telah diputuskan bahwa untuk pendekatan keseluruhan pulau, beberapa provinsi juga akan menjadi fokus kegiatan UN-REDD Programme Indonesia yang berikutnya. Selama semester kedua tahun 2010, beberapa misi kunjungan telah dilakukan di Sulawesi Tengah. Pertemuan-pertemuan telah diadakan dengan berbagai LSM, perkumpulan masyarakat sipil dan universitas lokal (terutama Universitas Tadulako, Palu), serta pemerintah lokal.

Menuju Arah yang Tepat

Untuk dapat mengetahui jumlah emisi yang dapat dihindari, dikurangi, maupun ditangkap, pengukuran karbon, pelaporan progresnya, dan pemeriksaan progres tersebut menjadi unsur mendasar dalam perencanaan implementasi mekanisme REDD+ yang efektif di negara mana pun. Aktivitas-aktivitas REDD+ perlu didasarkan pada perkiraan ilmiah yang solid jika dimaksudkan untuk mencapai hasil efektif. Hal ini membutuhkan metodologi untuk Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measuring, Reporting and Verification* atau MRV) emisi, dengan mengikuti prinsip-prinsip metodologi UNFCCC yang transparan, konsisten, komparatif, menyeluruh, dan akurat. Pendekatan-pendekatan praktis untuk memantau perubahan-perubahan di hutan dan karbon tanaman untuk REDD+ akan melibatkan



“UN-REDD Programme Indonesia memberikan dukungan melalui berbagai cara. Mereka memberikan kami (Pemerintah RI) metodologi untuk mengumpulkan data faktual untuk menghitung tingkat emisi. Mereka juga memfasilitasi penyusunan FPIC dalam rangka proses pembangunan kapasitas, menjembatani suara mayoritas masyarakat yang tak terdengar dengan pemerintah dan pelaku-pelaku REDD+. Jika program UN-REDD tidak ada di Indonesia, siapa yang akan menjembatani para pihak itu?”

Hadi Daryanto -
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kehutanan
Indonesia

teknik interpretasi citra penginderaan jauh (termasuk citra dirgantara dan satelit). Untuk pelaksanaan berbagai kegiatan REDD+ yang potensial, teknologi penginderaan citra jarak jauh sudah tidak lagi menjadi hambatan teknis. Hal ini telah banyak ditunjukkan oleh berbagai penelitian di banyak wilayah. Beragam metode bisa diaplikasikan sesuai kemampuan nasional, sumber daya yang tersedia, pola deforestasi, dan karakter hutan.

FAO bersama Kementerian Kehutanan telah mengembangkan materi informasi MRV untuk membantu melakukan diskusi dan meningkatkan pemahaman tentang MRV. Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas umum tentang MRV, UN-REDD Programme Indonesia bersiap-siap mengimplementasikan pelatihan Penginderaan Jarak Jauh dan Inventori Hutan di Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Universitas Tadulako (Palu). Pertemuan-pertemuan persiapan telah dilakukan untuk menyepakati silabus dan kerangka pelatihan.

UN-REDD Programme Indonesia juga tengah melakukan berbagai pertemuan dengan berbagai pihak untuk mengembangkan suatu wacana terkait dengan berbagai inisiatif MRV dan untuk meningkatkan kerja sama. Kegiatan ini lebih menekankan pada pengembangan sebuah Sistem Inventarisasi Hutan Nasional (*National Forest Inventory* atau NFI) yang disusun berdasarkan sistem NFI yang ada sebagai bagian penting dari sistem MRV. Oleh sebab itu, UN-REDD Programme Indonesia akan mempekerjakan seorang konsultan ahli untuk membuat rancangan baru NFI, dengan kerja sama erat dengan Kementerian Kehutanan dan para pemangku kepentingan lainnya.

Aspek lain dari sistem MRV adalah satelit pemantauan lahan. Interpretasi citra satelit Taman Nasional Lore Lindu di Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh UN-REDD Programme Indonesia dalam rangka menguji kemungkinan



Para panelis salah satu sesi lokakarya Indonesia Carbon Update 2010 (Desember 2010), sebuah acara yang diselenggarakan DNPI dan didukung UN-REDD Programme Indonesia. Paling kiri: Yuyu Rahayu, National Project Director, UN-REDD Programme Indonesia. (Foto: DNPI)

penggunaan citra satelit tersebut untuk mengidentifikasi berbagai kategori penggunaan lahan. Kegiatan ini telah menghasilkan beberapa peta tematik untuk Taman Nasional Lore Lindu.

Selain itu, UN-REDD Programme Indonesia telah mencoba menyusun tingkat emisi historis awal dari kawasan hutan di Sulawesi Tengah selama periode 2000-2009. Kegiatan ini dilakukan untuk menyajikan metodologi yang dapat diaplikasikan pada proses-proses MRV dan Tingkat Emisi Referensi (*Reference Emissions Level* atau REL)

Di semester kedua tahun 2010, UN-REDD Programme Indonesia membantu beberapa pertemuan konsultasi publik untuk menentukan lembaga mana yang akan bertanggung jawab atas MRV, REL, dan sistem manfaat yang adil di Indonesia. Seperti tertera di Lol Norwegia-Indonesia, lembaga MRV independen akan dibentuk untuk mengelola dan mengoordinasi semua lembaga yang menangani isu-isu terkait MRV dan REL di Indonesia. Dalam hal ini, FAO membantu Kementerian Kehutanan mengembangkan Peta Jalan (*Road Map*) MRV untuk Satgas REDD+ dan/atau lembaga lain di masa mendatang. Peta jalan ini mencakup informasi tentang tugas-tugas yang dibutuhkan dan badan-badan yang mungkin diperlukan untuk mengimplementasikan tugas-tugas itu, kerangka waktu, dan anggaran biaya.

Membangun Kemitraan Melalui Komunikasi, Jaringan Relasi, dan Pendekatan

Dunia kini sangat berbeda, namun kebutuhan untuk berkomunikasi dan berkerja sama paling tidak tetap sama pentingnya. Kerja sama adalah proses timbal balik yang melibatkan dua atau tiga orang atau organisasi yang bekerja bersama untuk



UN-REDD Programme Indonesia memastikan partisipasi generasi muda untuk mensukseskan implementasi REDD+, salah satunya dengan mengirim delegasi muda DNPI ke Konferensi Para Pihak (Conference of Parties ke-16 atau COP16) UNFCCC di Cancún, Meksiko (November-Desember 2010).
(Foto: DNPI)

“UN-REDD Programme Indonesia telah menyusun strategi dan pendekatan untuk berbicara, berkonsultasi dengan, dan melibatkan komunitas lokal untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, selain di saat yang sama menjaga kelangsungan hidup komunitas lokal tersebut.”

El-Mostafa Benlamlih
- UN Resident
Coordinator, Jakarta

mewujudkan tujuan bersama dengan cara berbagi pengetahuan, saling belajar, dan membangun konsensus. Kerja sama adalah dasar untuk mengumpulkan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian semua anggota tim inisiatif REDD+ secara efektif, demi mencapai kesiapan REDD+ di Indonesia. Salah satu kunci sukses kerja sama adalah komunikasi tentang upaya masing-masing pihak.

UN-REDD Programme Indonesia telah melakukan beberapa aktivitas untuk mengomunikasikan kegiatan dan produk-produk yang dihasilkannya. Beberapa langkah telah diambil. Di antaranya, UN-REDD Programme Indonesia telah menerbitkan:

1. Buku laporan tentang hikmah pembelajaran proses konsultasi berbagai pihak dalam penyusunan draf Stranas REDD+.
2. Buku versi awam tentang proses penyusunan Stranas REDD+
3. Video yang mempromosikan REDD+ di Indonesia dan upaya UN-REDD Programme Indonesia dalam mendukung Pemerintah RI mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam implementasi mekanisme REDD+, termasuk penyusunan Stranas REDD+ yang dipimpin oleh Bappenas. Video ini diputar di Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP16) di Cancún, Meksiko, bulan Desember 2010.
4. Sebuah Rekomendasi FPIC kepada Pemerintah RI, khususnya Satgas Nasional REDD+.

Di Sulawesi Tengah, UN-REDD Programme Indonesia telah membina hubungan dengan media lokal. Tahun ini UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan *Centre for People and Forests* (RECOFTC) menyelenggarakan lokakarya media nasional tentang REDD+ (April 2011), dengan memfasilitasi beberapa modul dan mensponsori jurnalis terpilih untuk berpartisipasi dalam lokakarya itu. UN-REDD Programme Indonesia melihat pentingnya memberi pelatihan kepada jurnalis, khususnya dari media lokal di Palu. Lebih jauh lagi, sebuah strategi komunikasi dan materi-materi informasi tentang proses FPIC dan aktivitas sub-nasional lainnya sedang dikembangkan.

Menjaring relasi dan melaksanakan rapat-rapat koordinasi dengan proyek-proyek/inisiatif terkait lainnya merupakan bagian penting dari program UN-REDD. Untuk itulah rapat-rapat dan diskusi-diskusi reguler dilakukan dengan pihak-pihak seperti GIZ, AusAID, USDA Forest Service, dan the World Bank. UN-REDD Programme Indonesia juga telah bekerja sama dengan mitra kelembagaan nasional seperti Satgas Nasional REDD+, Bappenas, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dan Dewan Kehutanan Nasional (DKN).

Di samping itu, UN-REDD Programme Indonesia melakukan banyak kontak dengan perwakilan-perwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan adat seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Organisasi Perempuan Adat Ngata Toro, *the Rainforest Foundation*, *World Wildlife Fund*, *The Nature Conservancy*, *World Resources Institute*. Peneliti-peneliti dari *The Center for International Forestry Research* (CIFOR), *The International Centre for Research in Agroforestry* (ICRAF), universitas-universitas asing dan di Indonesia telah membantu dalam pelaksanaan dialog yang menyangkut arsitektur REDD+ nasional.

Lebih jauh lagi, Kedutaan Besar Norwegia, Badan Kerja Sama Pembangunan Norwegia (*Norwegian Agency for Development Cooperation* atau Norad), *Project Management Unit* (PMU) UN-REDD Programme Indonesia, FAO, UNDP, dan UNEP merupakan mitra aktif yang selalu berkoordinasi untuk mensukseskan implementasi REDD+ di Indonesia. Berbagai pertemuan diadakan dengan negara-negara peserta UN-REDD lainnya untuk mengambil hikmah pembelajaran.

Rambu-Rambu Sosial

Sejak tahun 1980-an, hak komunitas adat dan lokal untuk memberikan persetujuan mereka atas dasar informasi awal tanpa paksaan (*free, informed and prior consent* atau FPIC) untuk kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi tanah atau kelangsungan hidup mereka semakin diakui oleh hukum internasional. Ada serangkaian instrumen internasional yang menegaskan berbagai unsur hak atas FPIC. Meski demikian, pernyataan paling jelas dan komprehensif tentang prinsip FPIC tertera pada Deklarasi Hak-hak Masyarakat Adat dari Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* atau UNDRIP) tahun 2007.

UN-REDD telah memprioritaskan kegiatan pembangunan kapasitas terkait dengan prinsip FPIC untuk berinteraksi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan tahun 2009—seperti penyusunan Panduan FPIC untuk UN-REDD Programme Indonesia—di tahun 2010, UN-REDD Programme Indonesia telah memperkuat diri dalam memahami prinsip FPIC melalui partisipasinya di kegiatan konsultasi Program UN-REDD Regional Asia dengan topik ‘Masyarakat Adat dalam Mekanisme FPIC dan Sumber Daya’ (*UN-REDD Programme Asia Regional Consultation with Indigenous Peoples on FPIC and Recourse Mechanisms*), 16-18 Juni 2010, di Hanoi, Vietnam.

“Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan dan/ atau Bappenas sebagai koordinator proses penyusunan Stranas REDD+ hendak mengucapkan terima kasih kepada UN-REDD Programme Indonesia yang telah bekerja keras menyelesaikan Draf Stranas REDD+”

Lukita Dinarsyah Tuwo
- Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Wakil Kepala Bappenas

Belajar dari upaya penyusunan panduan FPIC global oleh program UN-REDD global, UN-REDD Programme Indonesia di akhir bulan Desember 2010 dan awal Januari 2011 mendukung kegiatan penyusunan panduan FPIC. UN-REDD Programme Indonesia telah berkolaborasi dengan DKN untuk menyusun Panduan FPIC Nasional bagi REDD+ di Indonesia dengan menyelenggarakan lokakarya penyusunan konsensus nasional tentang pentingnya FPIC. Ketua Satgas Nasional REDD+, Kuntoro Mangkusubroto, membuka secara resmi lokakarya tersebut.

Secara paralel, kegiatan persiapan implementasi proses FPIC di Sulawesi Tengah juga telah dimulai. Melalui keterlibatan aktif berbagai pihak di tingkat sub-nasional, proses FPIC yang terarah akan diimplementasikan di provinsi percontohan dan/atau kabupaten. Beberapa lokakarya di tingkat provinsi maupun kabupaten tentang mekanisme FPIC telah diadakan pada akhir Desember 2010, dan beberapa misi untuk mendukung proses-proses penyusunan FPIC yang melibatkan pemangku kepentingan multipihak juga telah direncanakan. Belum lama ini, sebagai hasil proses FPIC, sebuah Rekomendasi Kebijakan FPIC baik untuk tingkat nasional (untuk penyusunan kebijakan FPIC nasional), maupun sub-nasional (untuk kebijakan percontohan), telah disampaikan ke Satgas Nasional REDD+.





Dewan Pengurus Proyek

KETUA:

BAMBANG SOEPIJANTO

Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI
Gedung Manggala Wanabakti
Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Indonesia

EL-MOSTAFA BENLAMLIH

UN Resident Coordinator Indonesia
Gedung Menara Thamrin Kav. 3
Jln. M. H. Thamrin, Jakarta, Indonesia

ANGGOTA:

- **Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta, Indonesia**
- **Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Kehutanan RI, Jakarta, Indonesia**
- **Kepala Pusat Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan RI, Jakarta, Indonesia**
- **Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas, Jakarta, Indonesia**
- **Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Jakarta, Indonesia**
- ***UN Resident Coordinator*, Jakarta, Indonesia**
- **Perwakilan FAO, Jakarta, Indonesia**
- ***Country Director UNDP*, Jakarta, Indonesia**
- **Perwakilan UNEP, Bangkok, Thailand**
- **Perwakilan LSM, Indonesia**

NATIONAL PROJECT DIRECTOR, PROJECT MANAGEMENT UNIT

Ir. Yuyu Rahayu, MSc.

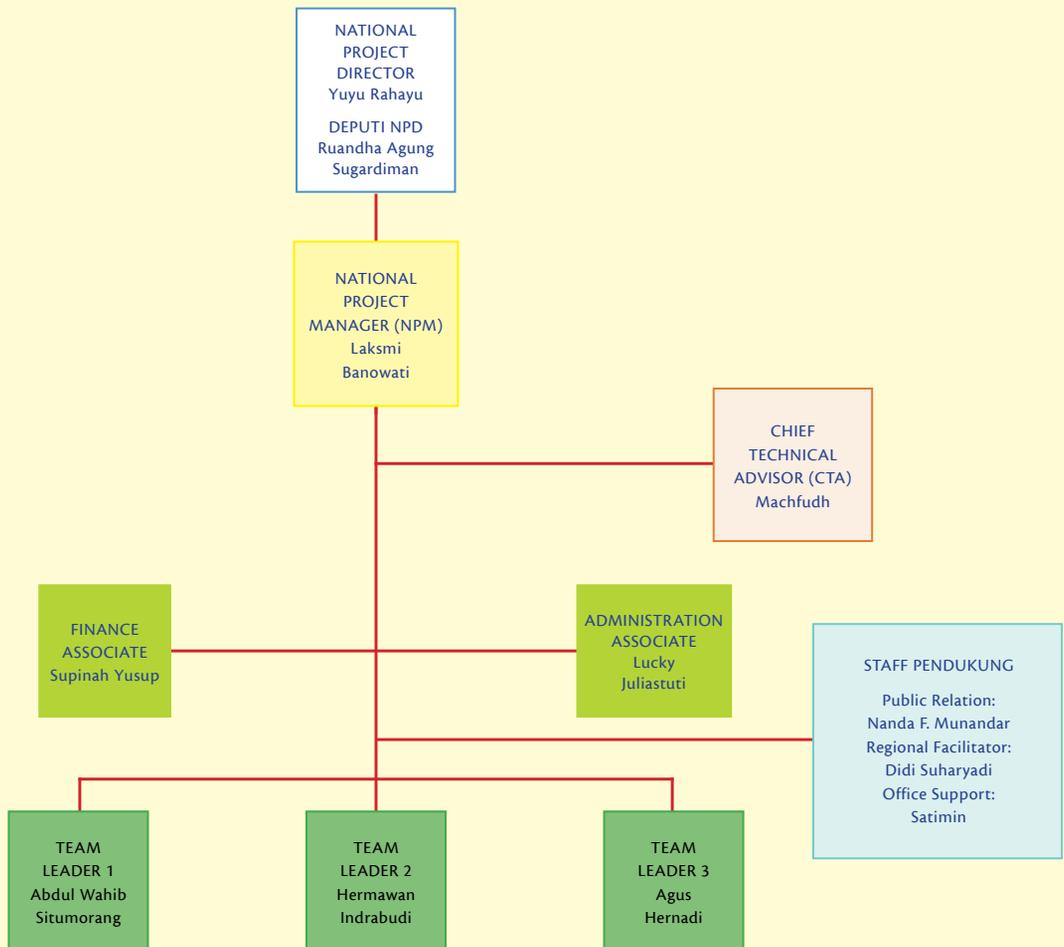
Gedung Manggala Wanabakti
Blok I, lantai 7, Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Indonesia

DEPUTY DIRECTOR, PROJECT MANAGEMENT UNIT

Dr. Ruandha Agung Sugardiman

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I, lantai 7, Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Indonesia

Struktur Organisasi



UN-REDD
PROGRAMME
INDONESIA

UN-REDD Programme Indonesia, Jakarta
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Lantai 5, Suite 525C
Jl. Jendral Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
tel. +62 21 - 570 3246/65 | fax. +62 21 - 574 6748

UN-REDD Programme Indonesia, Kantor Sulawesi Tengah
d/a Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah
Jl. S. Parman no 9, Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia
tel. +62 451 - 421 260/61 | fax. +62 451 - 426 860

www.un-redd.or.id



Dicetak di atas kertas daur ulang